



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN
MODAL KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sera Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja maka Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2757) ;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
12. Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang (Lembaran Daerah

Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 82) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 66), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Jenis-jenis perizinan yang dilimpahkan penandatungannya kepada Kepala BPM-PT terdiri dari:
1. Pendaftaran Penanaman Modal;
 2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha;
 6. Izin Usaha Perluasan;
 7. Izin Usaha Perubahan;
 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
 9. Izin Lokasi;
 10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 11. Izin Gangguan (HO) ;
 12. Izin Usaha Industri (IUI) ;
 13. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 14. Izin Perluasan Industri (IPI) ;
 15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
 16. Tanda Daftar Industri (TDI) ;
 17. Tanda Daftar Gudang (TDG) ;
 18. Izin Reklame;
 19. Dihapus ;
 20. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;
 21. Izin Usaha Angkutan;
 22. Izin Trayek;
 23. Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT) ;
 24. Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) ;
 25. Izin Usaha Rice Mill;
 26. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 27. dihapus ;
 28. dihapus ;
 29. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang terdiri dari :
 - a. SIUP Usaha Penangkapan Ikan;
 - b. SIUP Usaha Kapal Pengangkut Ikan;
 - c. SIUP Usaha Pembudidayaan Ikan;
 30. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

31. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 32. Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
 33. Izin Perpanjangan IMTA
 34. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
 35. Izin Mempergunakan Ketel Uap
 36. Izin Mempergunakan Tangki Timbul
 37. Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
 38. Izin Pengumpulan Uang dan Barang
 39. Izin Mengadopsi Anak
 40. Izin Oprasional Panti
 41. Izin Rumah Sakit Tipe C
 42. Izin Rumah Sakit Tipe D
 43. Izin Klinik Pratama
 44. Izin Klinik Utama
 45. Izin Apotek
 46. Izin Toko Obat
 47. Izin Optik
 48. Izin Pengobatan Tradisional
 49. Izin Pangan Industri Rumah Tangga
 50. Izin Praktek Dokter
 51. Izin Praktek Bidan
 52. Izin Kerja Bidan
 53. Izin Praktek Perawat
 54. Izin Kerja Perawat
 55. Izin Praktek Apoteker
 56. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
 57. Izin Kerja Analis Kesehatan
 58. Izin Kerja Refraksionist Optisien
 59. Izin Kerja Tenaga Gizi
 60. Izin Pendirian TK Negeri
 61. Izin Pendirian TK Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
 62. Izin Pendirian SD Negeri
 63. Izin Pendirian SD Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
 64. Izin Pendirian SMP Negeri
 65. Izin Pendirian SMP Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
 66. Izin PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
 67. Izin LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan)
 68. Izin TBM (Taman Belajar Masyarakat)
 69. Izin KBU (Kelompok Belajar Usaha)
 70. Izin KB (Kelompok Bermain)
 71. Izin TPA (Tempat Penitipan Anak)
 72. Izin Pos PAUD
 73. dihapus
 74. Izin Badan Hukum Koperasi
 75. Izin Usaha Operasional Simpan Pinjam
 76. dihapus
 77. IUTM (Izin Usaha Toko Modern)
 78. IUP2T (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat)
 79. Izin Pembuangan Limbah Cair
 80. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya Dan Beracun
 81. Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Hemodialisis.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 26 meliputi jenis-jenis usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 8 Februari 2017

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 8 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI BATANG NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG
PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BATANG

JENIS-JENIS USAHA PARIWISATA

NO	JENIS USAHA	SUB JENIS USAHA
1	2	3
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemandian Air Panas Alami 2. Pengelolaan Goa 3. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan & bangunan kuno. 4. Pengelolaan Museum 5. Pengelolaan Lingkungan & Pemukiman Adat 6. Penglolaan Objek Ziarah 7. Agro Wisata 8. Pengelolaan Hutan Wisata.
2	Kawasan Pariwisata	-
3	Jasa Transportasi Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkutan jalan wisata 2. Angkutan kereta api wisata 3. Angkutan sungai dan danau wisata 4. Angkutan laut domestik wisata 5. Angkutan laut internasional wisata
4	Jasa Perjalanan Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Perjalanan Wisata 2. Agen Perjalanan Wisata
5	Usaha Jasa Makanan dan Minuman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restoran 2. Rumah Makan 3. Bar / Rumah minum 4. Kafe 5. Pusat Penjualan Makanan 6. Jasa boga / Catering.
6	Usaha Penyediaan Akomodasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotel 2. Bumi Perkemahan 3. Persinggahan karavan 4. Villa 5. Pondok wisata 6. Motel 7. Balai pertemuan
7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gelanggang olah raga meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Lapangan golf b. Rumah bilyar

		<ul style="list-style-type: none"> c. Gelanggang renang d. Lapangan tennis e. Gelanggang bowling f. Tempat kesegaran jasmani / sanggar senam
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Gelanggang seni meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Sanggar seni b. Galeri seni c. Gedung pertunjukan seni / bioskop 3. Arena permainan 4. Hiburan malam meliputi ; <ul style="list-style-type: none"> a. Kelab malam b. Diskotik c. Pub 5. Panti pijat 6. Taman rekreasi 7. Karaoke 8. Jasa impresariat/promotor 9. Atraksi wisata 10. VCD rental
8	Usaha penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pertemuan; 2. Perjalanan Insentif; 3. Konferensi ; 4. Pameran
9.	Jasa Informasi Pariwisata	-
10.	Jasa Konsultan Pariwisata	-
11.	Jasa Pramuwisata	-
12.	Usaha Wisata Tirta	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wisata bahari meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Wisata selam; b. Wisata perahu layar / perahu wisata c. Wisata memancing d. Wisata selancar e. Wisata dermaga bahari 2. Wisata sungai meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Wisata arung jeram; b. Wisata dayung. 3. Kolam pemancingan.
13.	Usaha Spa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Spa / mandi uap/massage 2. Salon kecantikan 3. Jasa rias pengantin

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO